

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**

**DISKOPERINDAG
KABUPATEN
KEPULAUAN
MENTAWAI**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya lah, kami dapat membuat dan menyelesaikan bahan Rencana Kerja Tahun 2023 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

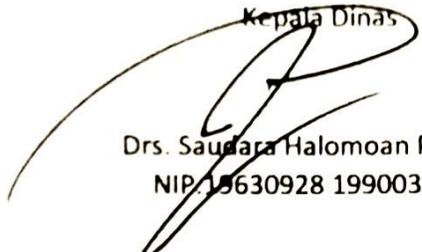
Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kepulauan Mentawai perihal Permintaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 maka Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menyusun Rencana Strategi selama 4 (empat) tahun 2023-2026 dan selanjutnya di tuangkan didalam Rencana Kerja tahunan sebagaimana dimaksud sesuai dengan permintaan.

Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan sudah maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023 tapi masih ada saja yang kurang seperti masih kurangnya sarana dan prasarana serta alokasi anggaran yang tersedia belum mengakomodir program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebagai sebuah OPD. Rencana kerja ini menggambarkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 dan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Tuapejat, Oktober 2022

Kepala Dinas


Drs. Saufara Halomoan Pardede
NIP. 19630928 199003 1012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KERANGKA ACUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 4

1.2 LANDASAN HUKUM 6

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 8

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERINDAG TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 10

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD. 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 24

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..... 25

3.3 Program dan Kegiatan..... 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

BAB V PENUTUP 36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023 merupakan modifikasi makna dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Rencana Strategi (RENSTRA) dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara normatif, penyusunan dokumen ini di dasari oleh semangat dan makna dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, *vide* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena disamping dokumen ini merupakan suatu pedoman penyusunan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi dokumen ini juga mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam penentuan efisiensi optimalisasi pelaksanaan agenda program kegiatan.

Dalam sistem administrasi penanganan urusan pemerintah sebagaimana tertuang kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok-pokok pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Keberhasilan kinerja suatu organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan diukur melalui berbagai indikator-indikator dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan/evaluasi. Pengukuran kinerja tersebut merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan merupakan jembatan antara perencanaan strategi dan akuntabilitas. Dalam era otonomi daerah, aspek perencanaan memiliki peranan penting dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah, karena melalui perencanaan, jauh sebelum terjadi perwujudan pembangunan, masyarakat lebih banyak mengerti tentang situasi daerahnya dan peranannya untuk berpartisipasi. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perencanaan akan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah atas dasar otonomi yang dimilikinya.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian target yang akan direncanakan. Sedangkan perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan nasional maupun daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Dengan penelaahan perencanaan pembangunan tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Hal tersebut menunjukkan urutan-urutannya saja, sebab didalam kegiatan perencanaan pembangunan nanti diharapkan bisa terkontrol dan kegiatan pembangunannya bisa berjalan dengan lancar.

Agenda program kegiatan yang bersifat prioritas maupun non prioritas dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung oleh dokumen yang terorganisir dan terencana sesuai menurut Tugas Pokok dan Fungsi. Karena untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara teknis, dokumen ini sudah merupakan konsekuensi logis bagi perangkat daerah yang hendak memformulasikan berbagai ide dan masukan dari spektrum yang lebih luas.

Salah satu pertimbangan dan indikator untuk memacu keberhasilan kinerja sesuai menurut standar pelayanan minimal dilingkup Organisasi Perangkat Daerah adalah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi dari program kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian, disamping dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bermanfaat sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan dan kendala yang dianggap telah terlaksana maupun dihadapi.

Untuk terjaminnya pelaksanaan program kegiatan secara optimal, efektif, efisien dan terencana, maka setiap proses perencanaan perlu dilakukan berbagai tahapan yang salah satu diantaranya yakni regulasi yang baik dan memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai menurut hukum normatif.

Dokumen ini disamping sebagai agenda dalam penyusunan perencanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bertujuan sebagai kerangka dalam mewujudkan pelayanan publik kearah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016, maka secara hukum administrasi kebijakan publik, dinas tersebut memiliki peran dan tanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan daerah dan mengaktualisasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berangkat dari uraian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, untuk menformulasikan peran dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dituntut patuh dan taat serta profesional kepada Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana telah diatur kedalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016.

Oleh karena itu, tanggungjawab dan beban kerja yang semakin berat dalam pengambilan sebagian urusan pemerintah dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan tersebut perlu memperhatikan dan menetapkan berbagai langkah-langkah dalam upaya penyusunan perencanaan program kerja tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Agenda yang diformulasikan kedalam dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahunan ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, baik yang bersifat prioritas maupun non prioritas dilingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu dokumen ini juga bermanfaat sebagai bentuk acuan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedalam bentuk-bentuk program kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga dengan demikian, untuk menentukan indikator keberhasilan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Organisasi Perangkat Daerah, maka dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas. Berangkat dari maksud dan tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dokumen ini hendaknya diharapkan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan kedalam format-format optimalisasi penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN LALU (2022)

Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan capaian Renstra OPD kondisi dan perkiraan capaian Tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi pelaksanaan tahun 2022 dan capaian renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana strategis Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Terdapat 4 Program pada Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021.

Dari empat jumlah program tersebut terdapat 13 (tiga belas) kegiatan, semua program dan kegiatan realisasi keuangan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a.** Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.

Pada dasar program /kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah direncanakan walaupun masih banyak yang harus dikerjakan untuk kedepan agar apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan dengan semestinya.

- b.** Program / kegiatan yang telah memenuhi target realisasi keuangan.

Pada dasarnya program / kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan tahun yang lalu sudah memenuhi target yang diinginkan, dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		
		REALISASI	PERSEN
		(Rp)	(%)
1	2	8	21
	BELANJA		
	<i>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Meneengah</i>		
1	<u>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	2.808.449.722	-
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.349.556.389	90,1
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	458.893.333	97,2
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	334.328.657	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	9.000.000	100,0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.380.990	95,7
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.990.400	99,9
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	11.000.000	55,0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.957.267	99,8
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.084.366	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	32.084.366	60,8
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	135.656.871	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.579.327	87,0
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	98.077.544	98,1

5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	105.039.150	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten Kota	105.039.150	98,1
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	430.772.061	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	430.772.061	90,0
7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	227.382.710	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	227.382.710	62,3
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	682.920.718	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	95.314.100	98,1
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	177.079.800	88,5
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	338.944.518	84,7
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	71.582.300	71,6
9	Program Pengembangan UMKM	509.164.191	
	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	509.164.191	81,4
10	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	33.272.500	

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	33.272.500	80,0
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	114.662.499	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	114.662.499	#REF!
12	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	107.260.400	
	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	107.260.400	74,5
13	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	173.960.500	
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	134.276.000	72,2
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	39.684.500	65,3
14	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	130.998.324	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	91.414.924	66,6
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	39.583.400	81,6
15	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.308.027.815	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	193.125.400	74,9
	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan peran serta masyarakat	1.114.902.415	87,1
16	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	40.702.200	

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	40.702.200	68,2
TOTAL ANGGARAN	7.174.682.684	

- c. Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Untuk Program /Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan tahun yang lalu tidak ada yang melebihi target hasil /keluaran yang direncanakan, untuk hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat di table 2.1 sebagai berikut :

e...monev Tabel 2.1
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengantahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2019			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2022)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2020				
					Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
2	17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,346,360,360	1,912,376,754	2,525,554,490	2,356,607,087	93	2,525,554,490	2,356,607,087	100		
2	17	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, internet	2 Rekening	2 Rekening	2 rekening	2 rekening	100	102 2 rekening	14	100
2	17	01	07	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengurusan STNK, KIR, Kendaraan dinas/operasional	2 Rekening	2 Rekening	2 rekening	2 rekening	100	30 unit	14	100
2	17	01	08	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor PA, PPTK, PPK dan pegawai kontrak	63 orang	63 orang	44 orang	44 orang	100	Orang	151	100
2	17	01	10	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat untuk kebersihan	12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	3	100
2	17	01	11	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	35 jenis	35 jenis	37 jenis	37 jenis	100	37 jenis	109	100
2	17	01	12	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	55 buah	55 buah	55 buah	55 buah	100	55 buah	165	100
2	17	01	15	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis	13 jenis	-	-	-	-	13	-
2	17	01	17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	2 media surat kabar	2 media surat kabar	100	2 media surat kabar	6	100
2	17	01	18	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	100	24 kali	72	100
	17			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	8 kali	8 kali	35 kali	35 kali	100	35 kali	78	100

2	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		29,100,000	26,323,900	94,620,000	93,859,250		94,620,000	214,803,150	
	17			Pengadaan kendaraan Dinas /operasional	Tersedianya mesin temple dan boat	-	-	2 unit	2 unit		1 tahun	2	100
2	17	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	-	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	2	100
	17			Pengadaan mobile	Jumlah lemari arsip dan meja kerja	-	-	2 jenis	1 jenis	64	2 tahun	1	100
2	17	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang peliharaan	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100	1	6	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong ke berhasilan dan beberapa factor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi perangkat daerah. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan SDM dalam rangka optimalisasi tupoksi.
- b. Sulitnya menempuh daerah yang terdiri dari pulau pulau serta dengan cuaca yang tidak menentu dan memakan biaya BBM yang tinggi.

Berikut Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 dengan rincian tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berdayasaing	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Pertumbuhan Koperasi	3%	5%	6%	2,50%	3,90%	2.0%
			Persentase Koperasi Aktif						50%
			Persentase Koperasi Sehat						10%
			Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi						2%
		Meningkatnya kapasitas UMKM	Cakupan Bina Kelompok UKM Produktif (modal diatas 50 juta)	3%	5%	6%	2,50%	3,90%	30%
			Persentase usaha non formal beralih ke usaha formal (mikro/kecil)						1%
2	Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Pengembangan Usaha Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Penjualan (Omset Usaha Perdagangan)	3%	5%	6%	3,95%	3,90%	2.80%
			Pertumbuhan Usaha Perdagangan						9%
			Realisasi Retribusi Pasar						74%
			Rata-rata Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Waktu						<9%

		Rata Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Antar Wilayah						<12%
		Persentase Usaha Dagang Tertib Ukur						60%

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peran dan posisi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Sumatera Barat maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian dan perdagangan masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan tantangan khususnya dalam upaya memenangkan kompetisi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN serta percaturan ekonomi global pada umumnya.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya

keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sebenarnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada beberapa produk yang punya potensi untuk ditingkatkan dalam pangsa pasar nasional dan internasional selain ukir dan furniture,. Beberapa produk itu mempunyai daya saing tinggi, sifat kekhasan daerah, kualitas produk dan kualitas yang baik diantaranya : Furniture, Tenun, Seni relief dan handycraf, Anyaman rotan, dll.

Untuk meningkatkan daya saing produk – produk unggulan Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga dikembangkan forum – forum komunikasi dan forum diskusi antar lembaga yang berorientasi terhadap pengembangan ekonomi daerah sebagai stakeholders daerah dalam pengembangan ekonomi diantaranya yaitu KADIN, ASHEPI, dll.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat Permasalahan yang di hadapi, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera/tera ulang
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM kemetropolitan
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan HKI
4. Persaingan pasar global yang makin ketat sehingga perlu peningkatan promosi baik dalam maupun luar negeri
5. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku IKM
6. Masih kurangnya pemanfaatan energi terbarukan.
7. Kurang berkembangnya teknologi permesinan di dalam negeri yang mendukung berkembangnya produk IKM.
8. Kurang optimalnya pembayaran retribusi pasar,dimana salah satu faktornya masih rendahnya kesadaran pedagang pasar dalam memenuhi kewajiban membayar retribusi dan panjangnya proses administrasi pembayaran retribusi.
9. Sarana prasarana bangunan pasar belum seluruhnya layak/representatif.
10. Keterbatasan anggaran berdampak pada kurang optimalnya fasilitasi dan penataan PKL.

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka bis berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai

masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim.

Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan. Beberapa usaha untuk meningkatkan pelayanan sesuai tugas dan fungsi diantaranya :

- ✓ Menghemat anggaran dalam kegiatan
- ✓ Terus berusaha meningkatkan pemasaran produk unggulan
- ✓ Menambah tenaga perena di metrologian
- ✓ Meningkatkan kualitas pengrajin IKM
- ✓ Peningkatan jumlah pasar dalam kondisi baik
- ✓ Penataan PKL dengan baik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan beberapa program kegiatan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan program kegiatan diperlukan dana dari APBD melalui Renja Tahun 2020. Tapi karena keterbatasan anggaran yang tersedia dai usulan yang ada dilakukan analisis sesuai dengan kebutuhan antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019, disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022, juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat.

Berbagai usulan dari masyarakat yang muncul di Musrenbang Desa kemudian dibawa dalam Musrenbang Kecamatan, lalu diteruskan ke SKPD sesuai tupoksi.

Dari situ kemudian akan ditelaah untuk dibahas di dalam lingkup SKPD untuk ditindaklanjuti dalam draft renja SKPD pada tahun yang akan datang. Berbagai pertimbangan akan diambil untuk meneruskan atau menunda program atau kegiatan usulan dari masyarakat, mulai dari ketersediaan anggaran, sampai pada bahan pendukung berupa proposal baik untuk pelatihan dan bantuan peralatan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Kepulauan Mentawai 2021, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan usulan dari masyarakat maupun dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selalu berupaya untuk lebih memaksimalkan semua program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan akan terapi semua tergantung pada semua pihak terutama pemerintah daerah, agar kedepannya apa yang sama-sama diharapkan tercapai terutama untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan.

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besara/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tersedianya Dokumen Usaha Mikro	40 UMKM	Pelatihan/Bimtek UMKM

**BAB
III**

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 telah menyinkronkan dengan Renstra Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 yaitu :

PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatnya Penguasaan Pasar	Belum optimalnya penguasaan pasar	Masalah transportasi dan perijinan	Masih terbukanya pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industry	Kurangnya anggaran dan keterbasaran SDM	Keterbatasan bahan Baku	Pelatihan dan magang
Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Banyak IKM yang belum berbadan hukum, sehingga tidak bisa menerima bantuan alat	Lamanya waktu untuk proses pengurusan legalitas	Perlu adanya terobosan agar IKM bisa mempunyai legalitas sebagai syarat pemberian bantuan alat
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industry	Masih belum merata sentra-sentra industry	Masuknya industry besar yang menyerap banyak tenaga kerja	Pelatihan dan magang
Menguatnya struktur Industry	Belum semua pengrajin menggunakan pembukuan dalam laporan keuangan	Keterbatasan SDM dan kurangnya pengetahuan	Dalam sentra sudah ada kesatuan dalam hal harga

3.1.2 Telaah Renstra Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Selain itu dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 juga telah menyinkronkan dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

**PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI BESERTA
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG**

Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatnya pertumbuhan Industri	Belum optimalnya pertumbuhan Industri	Masuknya industri besar	Peningkatan SDM dengan bintek dan magang
Meningkatnya nilai ekspor non migas	Belum optimalnya ekspor produk ekspor selain mebel	Kendala perijinan dan transportasi	Perlu pengetahuan tentang ekspor
Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar; dan	Belum terkontrolnya peredaran barang di masyarakat	Kurangnya anggaran dan SDM untuk kegiatan pengawasan	Perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas
Terwujudnya sistem distribusi yang efektif dan efisien.	Belum terkontrolnya peredaran barang di masyarakat	Kurangnya anggaran dan SDM untuk kegiatan pengawasan	Perlu sosialisasi kepada masyarakat supaya menjadi konsumen cerdas

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 s/d 2022, maka telah dibuat Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah selama 5 tahun ke depan. Adapun Visi dari Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**“ MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT YANG
BERDAYA SAING YANG BERBASIS MARITIM ”**

Dari Visi diatas dijabarkan ke dalam beberapa Misi yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Disini ada 5 Misi yang ditentukan oleh Kepala Daerah periode 2017-2022, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, Cerdas dan Produktif
2. Mewujudkan Infrastuktur yang merata, Berkualitas dan Berawawasan Lingkungan
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang berdaya saing yang berbasis Maritim
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, Bersih, Akuntabel dan Melayani
5. Mewujudkan Kebudayaan Masyarakat yang partisipatif, Harmonis dan Seimbang Berbasis Sosial Budaya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mewujudkan misi ke 3 yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang berdaya saing yang berbasis Maritim. Untuk mencapai misi diatas maka ditentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja koperasi
2. Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas, ditetapkan sasaran-sasaran yang lebih kongkrit seperti tersebut di bawah ini :

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang berdaya saing
		Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan

3.3. Program dan Kegiatan

Program pembangunan dan pengembangan Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan industri kecil dan menengah, terdiri dari kegiatan:
 - a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
 - b. Magang bagi Pelaku IKM
 - c. Revitalisasi sentra IKM DAK
 - d. Pengadaan alat sarana dan prasarana IKM, pengrajin ukir-ukiran, perbengkelan , pengolah minyak kelapa, dan pengrajin sandal
 - e. Verifikasi terhadap kelompok calon penerima bantuan
 - f. Fasilitasi kemasan produk agro industri potensial daerah
 - g. Pelatihan AMT (*Achivment Motivation Training*) bagi Pelaku IKM potensial
 - h. Operasional sentra industri kelapa
 - i. Pembinaan dan pengembangan produk kerajinan
 - j. Fasilitasi dan pembinaan bagi IKM bidang bordir dan fashion
 - k. Temu Bisnis Pelaku IKM
 - l. Pelatihan dan peningkatan mutu produk olahan agro industri
 - m. Pelatihan kerajinan berbahan batang kelapa
 - n. Magang perabot berbahan batang kelapa
 - o. Pelatihan kerajinan berbahan baku rotan
 - p. Pedidikan dan pelatihan keterampilan desain produk dari kayu
 - q. Pengadaan Sarana dan Prasarana IKM
 - r. Penyusunan rencana induk pembangunan industri daerah
 - s. Penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)/upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL)
 - t. Identifikasi dan Dokumentasi Kerajinan Tangan Tradisional Mentawai

- u. Pengembangan Produk Kerajinan Tangan Tradisional Mentawai
2. Program pengembangan kewirausahaan, keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan koperasi, terdiri dari kegiatan :
 - a. Penilaian Kesehatan KSP/USP
 - b. Pengawasan Koperasi
 - c. Bimbingan teknis perkoperasian serta fasilitasi badan hukum ke notaris bagi kelompok/prakoperasi
 - d. Revitalisasi koperasi yang tidak aktif
 - e. Pembinaan penerima bantuan dan evaluasi dana bergulir/bansos bagi koperasi
 - f. Fasilitasi Kerjasama dengan OJK dan Auditor
 - g. Pembentukan Dekopin
 - h. Pemberdayaan Kader Koperasi
 - i. Penyuluhan Perkoperasian Bagi Koperasi/Pra Koperasi
 - j. Fasilitasi Akses Terhadap Sumber Pendanaan
 - k. Fasilitasi Koperasi Melalui Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi, Pengolahan, Bahan Baku, Bahan Penolong dan Kemasan Bagi Koperasi Sektor Riil
 - l. Temu Bisnis Antara Koperasi dengan Sumber Informasi Bisnis
 - m. Fasilitasi Promosi dan Pendampingan Pemasaran
 3. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, terdiri dari kegiatan:
 - a. Fasilitasi HAKI bagi Koperasi dan UKM
 - b. Fasilitasi sertifikasi halal terhadap produk koperasi dan UKM
 - c. Pendampingan dan Pembinaan Pelaku UMKM
 - d. Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan UKM Berbasis Produk Hasil Pertanian
 - e. Pembinaan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM
 - f. Fasilitasi Kemitraan Koperasi UKM dengan BUMN/BUMD
 - g. Pembinaan penerima bantuan dan evaluasi dana bergulir/bansos bagi UKM
 - h. Pelatihan Pengembangan Produk Unggulan UKM
 - i. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pemberian IUMK
 - j. Validasi dan Pendataan UMKM
 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - a. Penyusunan DED/Perencanaan Pembangunan Pasar
 - b. Pembangunan pasar online untuk komoditi yang ada di mentawai
 - c. revitalisasi pasar

- d. Fasilitasi bagi Perdagangan Ekspor Komoditi terhadap pemanfaatan sumber daya
 - e. Fasilitasi Operasional Pasar Rakyat
 - f. Study Banding Bagi Pelaku Perdagangan Komoditi
 - g. Pelatihan dan Peningkatan Mutu Pemasaran Produk Unggulan Daerah
 - h. Temu Bisnis Pelaku Perdagangan
 - i. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perdagangan Daerah
 - j. Pengelolaan Website UMKM
 - k. Operasional Pasar
 - l. Pendataan alat UTTP
 - m. Pengadaan Alat UTTP
 - n. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP
 - o. Penyusunan Perda Retribusi tentang Tera dan Tera Ulang UTTP
 - p. Pengawasan dan Pemantauan Sub Penyalur BBM
 - q. Operasionalisasi Craft Center
 - r. Pengawasan peredaran dan harga BBM dan barang beredar di pasaran
 - s. Sosialisasi standarsasi dan perlindungan konsumen
 - t. Penyusunan perbup tentang pengawasan, pengendalian dan penyaluran BBM
 - u. Fasilitasi UMKM untuk kemasan produk
 - v. Penyusunan DED/Perencanaan Craft Centre
 - k. Penyelenggaraan Promosi Produk UKM/IKM
 - l. Pembangunan Carft Centre
 - m. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium UPTD Metrologi Legal
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - h. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- l. Penyediaan Makanan dan Minuman
- m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pembangunan fasilitas penunjang gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Musrenbang dan Pameran Pembangunan
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT PD

Rencana Kinerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel. 4.1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah menghadiri undangan rakor luar daerah	meningkatnya perdiaan komponen listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Laporan 14 kali	12 buah	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							70.000.000		
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	meningkatnya pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kab. Kepulauan Mentaw ai, Sipora Utara, Tuapejat	100 Persen	4 rekening	1 kali	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							45.000.000		
2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	terpeliharanya kendaraan operasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	13 jenis	11 unit	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							200.000.000		
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							200.000.000		
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi sehat	meningkatnya kualitas sdm usaha mikro	terlaksananya pelatihan koperasi	Kab. Kepulauan Mentaw ai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Persen	150 orang	2 kali	200.000.000	DAK Non Fisik BOS Reguler
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							200.000.000		
2	17	06	2,01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							200.000.000		
2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kew enangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Volume usaha Koperasi	jumlah kelompok usaha bidang pertanian, perikanan dan pariwisata yang mendapatkan penyuluhan koperasi jumlah koperasi yang difasilitasi perubahan akta koperasinya Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kew enangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pemberdayaan koperasi	Kab. Kepulauan Mentaw ai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 persen	5 kelompok 10 kecamatan 0 Unit Usaha 1 koperasi 1 dokumen	2 kali	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							450.000.000		
2	17	07	2,01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							450.000.000		
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro tersedianya data UMKM	terlaksananya pendataan koperasi	Kab. Kepulauan Mentaw ai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 persen	0 Dokumen 500 umkm	2 kali	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 17 07 2,01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	tersedianya data UMKM yang memenuhi syarat SIKP	terlaksananya pendataan koperasi	Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Sioban Kab. Kepulauan Mentawai, Sipora Selatan, Saureinu Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kelurahan	5 persen	120 umkm	2 kali	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM								1.600.000.000	
2 17 08 2,01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil								1.600.000.000	

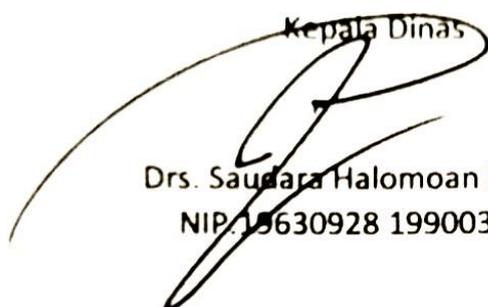
BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi Koperai Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Renja Diskoperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 menjadi acuan dan pedoman bagi segenap komponen rencana Disperindag dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor- faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.


Kepala Dinas
Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP. 19630928 199003 1012